

STRATEGI DINAS PERDAGANGAN KOTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA, DI KAWASAN WISATA PANTAI KELAPA LIMA KOTA KUPANG

Semi Yesrandi Banfatin¹, Simson Lasi², Marthen Dillak³

semiyesrandibanfatin29@gmail.com¹, simsonlasi22@gmail.com², marthendillak@gmail.com³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang”. Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam aspek penataan ruang, kebersihan, ketertiban, serta estetika kawasan wisata. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dilema antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan wisata yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi penataan PKL yang diterapkan pemerintah daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kondisi keberadaan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima, (2) bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penataan PKL, (3) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan PKL, dan (4) bagaimana efektivitas strategi penataan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi PKL, menganalisis strategi pemerintah daerah, mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan, serta menilai efektivitas penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kawasan Wisata Pantai Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penataan PKL dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi ke lokasi tertentu, pembinaan dan sosialisasi, penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pendekatan persuasif melalui dialog antara pemerintah dan pedagang. Strategi tersebut memberikan dampak positif berupa peningkatan ketertiban, kebersihan, estetika kawasan, serta meningkatnya daya tarik wisata dan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun demikian, masih terdapat dampak negatif seperti penurunan pendapatan sebagian pedagang, penolakan terhadap kebijakan relokasi, ketidakpastian lokasi usaha, serta masih adanya ketidakteraturan di beberapa titik kawasan wisata. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas pendukung, penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan partisipatif yang lebih intensif agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi PKL dan pengembangan kawasan wisata secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kawasan Wisata, Implementasi Kebijakan, Pariwisata Berkelanjutan.

ABSTRACT

This study is entitled "Local Government Strategy in Managing Street Vendors in the Kelapa Lima Beach Tourist Area, Kupang City." This research was conducted because the presence of street vendors (PKL) in the Kelapa Lima Beach tourist area plays a vital role in supporting the local economy, but also poses challenges in terms of spatial planning, cleanliness, order, and aesthetics of the tourist area. This situation demonstrates a dilemma between the community's economic interests and the local government's efforts to create an organized, comfortable, and sustainable tourist area. Therefore, a more in-depth study of the street vendor management strategies implemented by the local government is necessary. The research questions include: (1) the condition of street vendors in the Kelapa Lima

Beach tourist area; (2) the local government's strategy for managing street vendors; (3) the obstacles faced in implementing street vendor management policies; and (4) the effectiveness of these strategies. The objectives of this study are to describe the condition of street vendors, analyze local government strategies, identify obstacles to policy implementation, and assess the effectiveness of street vendor management in the Kelapa Lima Beach tourist area. This study used a qualitative descriptive approach, located in the Kelapa Lima Beach tourist area in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, followed by descriptive analysis to obtain a comprehensive picture of the phenomenon under study. The results indicate that street vendor management strategies were implemented through zoning regulations, relocation to specific locations, guidance and outreach, enforcement by the Public Order Agency (Satpol PP), and a persuasive approach through dialogue between the government and vendors. These strategies had positive impacts, including improved order, cleanliness, and aesthetics of the area, as well as increased tourist appeal and economic opportunities for the local community. However, negative impacts persisted, such as decreased income for some vendors, resistance to the relocation policy, uncertainty about business locations, and continued disorder in several areas of the tourist area. The conclusion of this study indicates that the local government's strategy for managing street vendors in the Kelapa Lima Beach tourist area has been implemented, but it has not been fully effective due to a gap between formulated policies and implementation on the ground. Therefore, it is necessary to improve supporting facilities, strengthen the monitoring system, and adopt a more intensive participatory approach to create a balance between the economic interests of street vendors and the sustainable development of tourism areas.

Keywords: Local Government Strategy, Street Vendors (PKL), Tourist Area, Policy Implementation, Sustainable Tourism..

PENDAHULUAN

Pantai Kelapa Lima, yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ikonik di bagian timur Indonesia. Kawasan ini dikarakterisasi oleh keindahan alamnya yang eksotis, meliputi hamparan pasir putih yang luas, perairan laut yang jernih dengan gradasi warna biru, serta barisan pohon kelapa yang rimbun disertai vegetasi tropis seperti pohon lontar dan gamal, yang secara keseluruhan menciptakan suasana relaksasi alami. Sejak akhir dekade 2000-an, area ini telah berkembang menjadi pusat rekreasi wisata, didukung oleh inisiatif pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata berkelanjutan di NTT, termasuk peningkatan infrastruktur seperti jaringan akses jalan, fasilitas parkir, dan sarana umum lainnya.

Meskipun demikian, kehadiran pedagang kaki lima (PKL) menjadi faktor krusial yang memengaruhi estetika kawasan, di mana mereka berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi lokal dengan menyediakan layanan bagi para pengunjung, namun juga menimbulkan isu visual akibat penataan yang kurang terorganisir. Penelitian ini menyoroti ketegangan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh PKL dan upaya pelestarian keindahan Pantai Kelapa Lima, yang sering menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun internasional. Pantai ini mulai diakui sebagai kawasan wisata yang terstruktur sekitar tahun 2010, sejalan dengan program Pemerintah Kota Kupang untuk merevitalisasi pantai-pantai pesisir sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata NTT pasca-peristiwa konflik sosial dan bencana alam. Sebelumnya, pantai ini lebih bersifat alami dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk kegiatan perikanan serta rekreasi sederhana. Inisiatif seperti program "Kupang Kota Layak Huni" serta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mendorong perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan promenade dan zona hijau, yang telah meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 15-20% per tahun menurut data Dinas Pariwisata Kota Kupang pada tahun 2021.

Masyarakat lokal, yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan, perdagangan kecil, dan pariwisata, telah merespons perkembangan ini dengan membuka usaha PKL secara

spontan, menawarkan kuliner khas NTT seperti jagung bakar, ikan bakar, dan minuman segar dari kelapa. Akan tetapi, tanpa regulasi yang komprehensif, PKL cenderung menduduki ruang publik secara tidak teratur, yang mengganggu desain estetika kawasan yang dimaksudkan untuk menekankan elemen alam. PKL memainkan peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat pesisir Kupang, yang kerap menghadapi tantangan seperti pengangguran musiman akibat kondisi cuaca tropis dan keterbatasan akses pasar. Mereka menyediakan akses yang terjangkau terhadap makanan lokal, seperti sate rembiga atau es sagu, yang memperkaya pengalaman wisata dan memperpanjang durasi kunjungan. Penelitian dari Universitas Nusa Cendana (2022) mengindikasikan bahwa PKL berkontribusi sekitar 30-50% terhadap pendapatan harian keluarga nelayan dan pedagang kecil di kawasan wisata Kupang, termasuk Pantai Kelapa Lima, sekaligus memperkuat ikatan sosial melalui nilai-nilai gotong royong dan adaptasi komunitas. Secara sosial, kehadiran PKL mencerminkan ketahanan masyarakat Timor yang kaya akan tradisi kolektif, di mana para pedagang sering berasal dari kelompok etnis lokal yang beralih dari perikanan tradisional ke sektor pariwisata.

Namun, dampak negatif terhadap estetika muncul dari akumulasi gerobak kayu, tenda sementara, dan limbah organik yang tidak dikelola, yang dapat menimbulkan bau tidak menyenangkan dan menurunkan nilai estetis pantai. Estetika Pantai Kelapa Lima bergantung pada harmoni antara elemen alam, seperti panorama matahari terbenam yang menakjubkan, hembusan angin yang lembut, dan vegetasi hijau, dengan tata ruang terbuka yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan tanpa gangguan. Kehadiran PKL yang tidak terkelola seringkali mengganggu aspek ini melalui kekacauan visual dari peralatan dagang yang tersebar, kemacetan di jalur pejalan kaki, dan akumulasi sampah plastik yang mencemari pasir pantai. Survei persepsi pengunjung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTT (2023) mengungkapkan bahwa 60% responden memandang PKL sebagai penghalang utama terhadap estetika kawasan, meskipun 75% mengakui kontribusi ekonominya bagi komunitas lokal. Kasus serupa di pantai-pantai lain di NTT, seperti Pantai Lasiana, atau di luar wilayah seperti Pantai Losari di Makassar, menunjukkan bahwa relokasi PKL ke area terintegrasi, seperti food court semi-permanen, dapat meminimalkan dampak negatif sambil mempertahankan aksesibilitas, walaupun sering dihadapkan pada penolakan dari pedagang karena kekhawatiran atas penurunan omset sebesar 20-30%.

pantai Kelapa Lima merupakan salah satu kawasan wisata yang menarik banyak pengunjung di kota kupang. Di kawasan ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup signifikan, baik sebagai penunjang ekonomi lokal maupun sebagai potensi penghambat kenyamanan wisatawan jika tidak tertata dengan baik. Penataan pedagang kaki lima menjadi sangat penting untuk mengatur kelancaran aktivitas wisata sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi para pedagang. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi efektif dalam mengelola dan menata PKL agar kawasan wisata tetap nyaman, aman, dan menarik bagi pengunjung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian Empiris yaitu penelitian yang seluruh data di dapatkan dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden di tempat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima yang secara administratif berada di wilayah Kota Kupang. Kawasan ini merupakan salah satu pusat

aktivitas wisata masyarakat sekaligus ruang ekonomi informal yang berkembang pesat, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL).

Secara geografis, Pantai Kelapa Lima terletak di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Timor serta memiliki aksesibilitas yang cukup baik dari pusat kota. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi strategis yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada sore hari dan akhir pekan. Tingginya intensitas kunjungan tersebut secara langsung menciptakan peluang ekonomi yang dimanfaatkan oleh PKL untuk menjalankan berbagai jenis usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keberadaan PKL di kawasan ini menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak sepenuhnya terencana. PKL umumnya menempati area sepanjang pesisir, trotoar, dan ruang terbuka publik tanpa penataan zonasi yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan ruang publik oleh PKL masih cenderung bersifat spontan dan berbasis kebutuhan ekonomi, bukan berdasarkan pengaturan yang sistematis.

Dari aspek sosial-ekonomi, aktivitas PKL di kawasan Pantai Kelapa Lima memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Jenis usaha yang dijalankan meliputi penjualan makanan siap saji, minuman, hasil laut, serta berbagai produk lainnya yang mendukung aktivitas wisata. Namun demikian, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban penataan, potensi konflik penggunaan ruang, serta kurangnya pengelolaan kebersihan lingkungan.

Dalam konteks kebijakan, kawasan ini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Kupang melalui instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata. Upaya penataan PKL telah dilakukan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya PKL yang beroperasi di luar area yang ditentukan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, kondisi kawasan Pantai Kelapa Lima mencerminkan adanya dinamika antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya penataan oleh pemerintah. Situasi ini menjadi dasar penting dalam menganalisis strategi pedagang kaki lima dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah keterbatasan ruang dan kebijakan penataan yang ada.

B. Strategi Dinas Perdagangan Kota Kupang

Strategi Dinas Perdagangan Kota Kupang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, yang membedakan PKL swadaya (di lahan swasta dengan pemberitahuan RT/RW/kelurahan) dan PKL pemerintah (di lahan publik dengan fasilitas khusus). Pendekatan ini menekankan sifat sementara PKL, pembinaan, relokasi ke lokasi strategis seperti Alun-Alun Kota dan Taman KJP, serta penertiban reaktif jika mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, atau kepentingan publik. Strategi terintegrasi dengan keterlibatan lintas instansi (Dinas Pariwisata, Koperasi, Satpol PP) dan regulasi nasional (Permen/Perpres PKL).

1. Penataan Lokasi

a. Penyediaan Area Khusus PKL

Pemerintah menyediakan fasilitas khusus di lokasi strategis seperti Alun-Alun Kota, Taman KJP, dan lopo depan Hotel Hasan Sadikin untuk PKL pemerintah. PKL swadaya di lahan swasta (misalnya Pasir Panjang) tetap diawasi melalui pendataan RT/RW/kelurahan. Prioritas pada pengaturan parkir dan citra kawasan wisata, dengan PKL diarahkan menjual makanan/minuman siap saji (jagung bakar, pisang bakar) agar tidak mengganggu fungsi utama lokasi.

b. Pengaturan Zonasi

Zonasi ketat sesuai Perda No. 6/2012, melarang PKL di bahu jalan, badan jalan, atau trotoar. PKL dibatasi pada area yang tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan publik, dengan relokasi wajib jika lahan dibutuhkan pemerintah. Lokasi terbatas di Kota Kupang (kota jasa) dimanfaatkan secara bertahap, misalnya PKL Kelapa Lima dipindah ke Alun-Alun atau Taman KJP.

2. Pembinaan PKL

a. Sosialisasi Aturan

Pendataan berkala oleh Dinas Perdagangan di tingkat RT/RW/kelurahan untuk sosialisasi Perda dan regulasi nasional, menekankan sifat sementara PKL serta transisi ke UMKM jika permanen (bangunan tetap memerlukan izin). Sosialisasi juga mencakup negosiasi lahan swasta dan kewajiban pindah jika diperlukan.

b. Pelatihan Kebersihan dan Pelayanan

Pembinaan fokus meningkatkan omset melalui bantuan (misalnya untuk PKL makanan/minuman), pelatihan estetika tampilan, kebersihan, dan penjualan produk wisata (minuman, makanan ringan/tradisional). Hal ini mendukung citra kawasan wisata dan partisipasi pedagang dalam relokasi.

3. Penertiban

a. Penertiban Bersama Satpol PP

Penertiban reaktif dilakukan Satpol PP secara gabungan dengan Dinas Perdagangan, Pariwisata, dan Koperasi jika PKL melanggar (misalnya mengganggu lalu lintas atau fungsi publik). Frekuensi 1 kali per bulan/triwulan, diumumkan via media untuk transparansi.

b. Pengawasan Rutin

Pengawasan melalui pendataan berkala dan monitoring lokasi, dengan toleransi selama tidak ada keluhan. PKL swadaya tetap dipantau meski tanpa izin formal, untuk mencegah permanen dan dorong relokasi.

4. Pendekatan Persuasif

Pendekatan dialog dengan PKL menjadi solusi efektif dibanding tindakan represif, seperti negosiasi relokasi ke sarana pemerintah (meski tantangan seperti penolakan lopo Hotel Hasan karena preferensi jual ikan mentah). Pemerintah prioritaskan pembinaan dan bantuan untuk tingkatan partisipasi, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan jumlah pedagang (dari 2 menjadi 10) dan transaksi di lokasi strategis, sambil atasi polemik lahan terbatas serta image buruk melalui pengaturan parkir dan diversifikasi produk.

C. Dampak Strategi Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

Setelah Melakukan wawancara dengan Perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Kupang Yaitu Bapak Gun (sekertaris) Pada Tanggal 9 April tahun 2026, mengatakan bahwa strategi lain untuk meningkatkan mereka punya omset misalkan ada pemerintah juga hadir untuk memberikan bantuan contoh kepada PKL yang jual minuman dan makanan". Bapak Gun mengatakan bahwa "strategi penataan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak pada pedagang kaki lima, yaitu meningkatkan omset mereka melalui bantuan pemerintah kepada PKL yang jual minuman dan makanan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gun ada juga beberapa dampak yang muncul akibat penerapan strategi penataan PKL oleh pemerintah daerah. Dampak-dampak tersebut terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

- a. Dari aspek positif, pelaksanaan strategi penataan PKL memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh para pedagang maupun masyarakat sekitar.
- b. adanya upaya peningkatan penampilan kawasan melalui penataan fisik kawasan rapih dan tertata.
- c. berkurangnya gangguan terhadap arus lalu lintas terutama di jalan-jalan utama yang

sebelumnya banyak digunakan oleh para PKL.

- d. meningkatnya kesadaran PKL terhadap peraturan-peraturan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara berkala oleh instansi terkait.
- e. adanya kepastian lokasi berusaha bagi PKL yang bersedia menempai lokasi-lokasi yang telah disediakan pemerintah, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan lebih tenang tanpa kuatir akan dertibkan sewaktu-waktu.

2. Dampak Negatif

Meskipun demikian, penerapan strategi penataan juga menimbulkan beberapa dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

- a. ketidaksesuaian fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan aktual PKL, terutama bagi pedagang yang menjual produk segar seperti ikan yang memerlukan fasilitas pendingin dan sumber air yang memadai, menyebabkan banyak PKL menolak menempai sarana yang telah disediakan pemerintah.
- b. keterbatasan lokasi alternatif yang tersedia membuat proses relokasi menjadi sulit dilaksanakan, mengingat PKL yang telah lama beroperasi di lokasi tertentu merasa nyaman dan cenderung menolak untuk dipindahkan ke tempat baru.
- c. keluhan mengenai fasilitas pendukung yang belum memadai seperti penerangan yang kurang optimal untuk menarik pengunjung pada malam hari, ketersediaan tempat sampah yang masih terbatas, serta ketiadaan fasilitas pendukung lain seperti tempat duduk dan payung matahari.
- d. minimnya program pendampingan konkret dari pemerintah untuk mengembangkan usaha para pedagang, berbeda dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku usaha formal.

D. Dampak Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kawasan wisata

Setelah Melakukan wawancara dengan Bapak Gun (Sekertaris Dinas Perdagangan Kota) pada tanggal 9 April tahun 2026 beliau mengatakan bahwa ada beberapa dampak PKL terhadap kawasan wisata yaitu :

1. dapat meningkatkan Nilai estetika dan daya tarik wisata,

Walaupun PKL bersifat swadaya dan tidak punya tempat permanen, “terlihat ada nilai estetikanya terhadap mereka walaupun lahan yang dipakai”. PKL yang jual minuman, makanan ringan, makanan tradisional lokal seperti jagung bakar, pisang bakar dengan berbagai varian juga menambah keragaman kuliner untuk pengunjung.

2. Peningkatan omset PKL

Pemerintah punya strategi “untuk meningkatkan mereka punya omset misalkan ada pemerintah juga hadir misalkan Dia memberikan bantuan contoh kepada PKL yang jual minuman dan makanan”. Jadi adanya penataan dan bantuan dari pemerintah berdampak langsung ke pendapatan PKL.

3. Perlu penataan agar tidak mengganggu kawasan wisata

Dampak negatif yang disinggung adalah kalau tidak ditata, PKL bisa mengganggu. Pemerintah berharap penataan supaya PKL “berada pada lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah... sepanjang tidak mengganggu arus lalu lintas dan kepentingan orang lain”. Contoh masalahnya: di lopo yang seharusnya untuk makanan siap saji, malah masih dipakai jual ikan mentah karena tidak sesuai keinginan pedagang, jadi sarana itu belum terpakai.

pengunjung reguler (Ronaldi Atonis) juga mengatakan bahwa: "Adanya Pedagang kaki lima sehingga pengunjung makin banyak bisa duduk santai sampil minum kopi, isap rokok, makan jagung bakar, dan lain sebagainya".

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang, strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan berbagai dampak terhadap kondisi kawasan wisata. Dampak tersebut meliputi dampak positif maupun dampak negatif yang berkaitan dengan aspek kebersihan, ketertiban, kenyamanan pengunjung, aktivitas ekonomi,

serta citra kawasan wisata.

1. Dampak Positif terhadap Kawasan Wisata

a. Meningkatnya Ketertiban Kawasan Wisata

Strategi penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Melalui pengaturan zonasi dan relokasi PKL, penggunaan trotoar, badan jalan, dan ruang publik dapat lebih terkontrol sehingga aktivitas pengunjung menjadi lebih nyaman.

Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama Satpol PP juga membantu mengurangi aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi tersebut mendukung terciptanya kawasan wisata yang lebih tertata dan teratur.

b. Meningkatnya Kebersihan dan Estetika Kawasan

Kebijakan pemerintah yang mengarahkan PKL untuk menjual makanan dan minuman siap saji serta membatasi penjualan ikan mentah memberikan dampak terhadap peningkatan kebersihan kawasan wisata. Sebelumnya, aktivitas penjualan ikan mentah menimbulkan bau tidak sedap dan penumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan pengunjung.

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pedagang mulai lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan penataan tempat usaha. Hal ini memberikan dampak positif terhadap estetika kawasan sehingga Pantai Kelapa Lima menjadi lebih menarik sebagai destinasi wisata.

c. Meningkatnya Daya Tarik Wisata

Penataan kawasan wisata yang lebih rapi dan tertib turut meningkatkan daya tarik Pantai Kelapa Lima bagi masyarakat dan wisatawan. Keberadaan PKL yang menjual makanan, minuman, dan kuliner khas daerah dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata kuliner yang mendukung aktivitas pariwisata.

Kondisi kawasan yang lebih nyaman dan tertata memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung sehingga berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

d. Mendorong Aktivitas Ekonomi Kawasan

Keberadaan PKL di kawasan wisata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas perdagangan yang berlangsung di sekitar kawasan wisata mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung juga berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Pantai Kelapa Lima. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kawasan wisata.

2. Dampak Negatif terhadap Kawasan Wisata

a. Masih Terjadinya Ketidakteraturan Penataan

Meskipun pemerintah telah melakukan penataan, masih terdapat PKL yang berjualan di area yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti trotoar dan badan jalan. Kondisi ini menyebabkan kawasan wisata belum sepenuhnya tertata dengan baik dan masih menimbulkan kesan semrawut pada beberapa titik lokasi.

Kurangnya kepatuhan pedagang terhadap aturan menunjukkan bahwa implementasi penataan kawasan masih belum berjalan optimal.

b. Timbulnya Permasalahan Kebersihan Lingkungan

Aktivitas PKL di kawasan wisata masih menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah. Beberapa pedagang belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai sehingga sampah dari aktivitas perdagangan berpotensi mencemari kawasan pantai.

Selain itu, penjualan ikan mentah yang sebelumnya dilakukan di beberapa lokasi juga menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Kondisi tersebut dapat memengaruhi citra kawasan wisata apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

c. Berkurangnya Kenyamanan Pengunjung

Keterbatasan fasilitas pendukung seperti area parkir, penerangan, dan ruang usaha yang tertata menyebabkan kenyamanan pengunjung masih terganggu. Area parkir yang sempit sering menimbulkan kepadatan kendaraan, terutama pada waktu ramai pengunjung.

Kurangnya penerangan di beberapa titik kawasan wisata juga membuat pengunjung merasa kurang nyaman pada malam hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan kawasan belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai.

d. Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Publik

Keberadaan PKL di kawasan wisata juga menimbulkan potensi konflik dalam pemanfaatan ruang publik. Di satu sisi, kawasan wisata digunakan sebagai ruang ekonomi masyarakat, namun di sisi lain pemerintah berupaya menjaga fungsi kawasan sebagai ruang publik yang tertib dan nyaman.

Perbedaan kepentingan tersebut sering menimbulkan penolakan terhadap kebijakan relokasi dan penertiban. Akibatnya, proses penataan kawasan wisata menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Secara keseluruhan, strategi penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban, kebersihan, estetika, dan aktivitas ekonomi kawasan. Namun demikian, masih terdapat berbagai dampak negatif yang berkaitan dengan ketidakteraturan penataan, keterbatasan fasilitas, serta permasalahan kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan kawasan wisata memerlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan pedagang agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan upaya menjaga kualitas kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kesadaran pedagang dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima.

E. Tantangan dan Hambatan Implementasi yang Dihadapi Dinas Perdagangan Kota Kupang dan Pedagang Kaki Lima

Setelah Melakukan wawancara Dengan Bapak Gun pada tanggal 10 April tahun 2026 beliau mengatakan bahwa Ada berapa tantangan yang sering dihadapi Dinas Perdagangan dan Pedagang Kaki Lima yaitu:

1. Polemik relokasi dan bangunan yang belum dapat digunakan.

sehingga ada polemiknya sampai saat ini juga belum bisa terselesaikan, sehingga sarana bangunan itu belum bisa dipakai. Bapak Gun Mengatakan bahwa "kami sudah berusaha, namun belum menemukan solusi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima."

2. Keterbatasan lokasi

Pemerintah Daerah Kota Kupang memiliki lokasi yang sangat terbatas. Misalnya, alun-alun kota juga dipakai oleh PKL di Kelapa Lima, kemudian Taman KJP juga berada di Kelapa Lima. Jadi, bagaimana dengan lokasi yang begitu terbatas.

3. Kendala dalam memindahkan PKL

Jika sarana atau tempat itu akan digunakan oleh pemerintah, maka mereka harus bersedia untuk berpindah atau bergeser. Di sinilah letak kendala-kendalanya.

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang, implementasi strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut tidak hanya dialami oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dirasakan oleh para pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hambatan yang muncul meliputi aspek sosial, ekonomi, sarana prasarana, pengawasan, serta partisipasi pedagang dalam mendukung program penataan.

1. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Perdagangan Kota Kupang

a. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Kupang adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai penataan dan penempatan lokasi usaha, masih terdapat pedagang yang berjualan di trotoar, badan jalan, dan area yang dilarang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin pedagang masih belum optimal, sehingga implementasi kebijakan penataan belum berjalan secara efektif.

b. Keterbatasan Lahan untuk Relokasi

Keterbatasan lahan di Kota Kupang menjadi salah satu hambatan dalam menyediakan lokasi relokasi yang strategis bagi PKL. Sebagai kota jasa dengan ruang publik yang terbatas, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan area usaha yang mampu menampung seluruh pedagang tanpa mengganggu fungsi kawasan wisata dan ketertiban umum.

Akibatnya, sebagian pedagang menolak relokasi karena lokasi yang disediakan dianggap kurang strategis dan dinilai dapat menurunkan pendapatan mereka.

c. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan

Pengawasan terhadap aktivitas PKL masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) umumnya bersifat periodik atau insidental sehingga belum mampu menciptakan ketertiban yang bersifat permanen.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang kembali berjualan di lokasi yang tidak sesuai setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan aturan masih belum optimal.

d. Keterbatasan Fasilitas Pendukung

Keterbatasan fasilitas pendukung seperti penerangan, area parkir, tempat sampah, dan sarana usaha menjadi hambatan dalam implementasi penataan PKL. Fasilitas yang belum memadai menyebabkan pedagang kurang tertarik untuk menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah.

Selain itu, kondisi tersebut juga memengaruhi kenyamanan pengunjung kawasan wisata sehingga tujuan penataan kawasan belum tercapai secara maksimal.

e. Rendahnya Partisipasi Pedagang dalam Proses Penataan

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah masih rendahnya partisipasi PKL dalam mendukung program penataan. Sebagian pedagang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka.

Akibatnya, muncul penolakan terhadap kebijakan relokasi dan penertiban, seperti pada fasilitas lopo yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pedagang.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Ketidakpastian Lokasi Usaha

PKL menghadapi tantangan berupa ketidakpastian lokasi usaha akibat kebijakan relokasi dan penataan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Status usaha yang bersifat sementara menyebabkan pedagang merasa kurang memiliki jaminan keamanan dalam menjalankan usahanya.

Kondisi tersebut menyulitkan pedagang untuk mengembangkan usaha secara permanen karena belum adanya kepastian mengenai lokasi usaha yang tetap.

b. Penurunan Pendapatan akibat Kebijakan Penataan

Kebijakan penataan, khususnya larangan penjualan ikan mentah dan relokasi lokasi usaha, memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan sebagian pedagang. Pedagang harus menyesuaikan jenis usaha dan mencari pelanggan baru di lokasi yang berbeda.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pedagang karena tidak semua lokasi relokasi

memiliki tingkat keramaian dan potensi pembeli yang sama dengan lokasi sebelumnya.

c. Keterbatasan Modal dan Sarana Usaha

Sebagian besar PKL di kawasan Pantai Kelapa Lima menjalankan usaha secara swadaya dengan fasilitas yang terbatas. Pedagang harus menyediakan sendiri perlengkapan usaha seperti tenda, meja, penerangan, dan peralatan lainnya.

Keterbatasan modal menyebabkan pedagang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas usaha maupun menyesuaikan usaha dengan standar penataan yang diharapkan pemerintah.

d. Kurangnya Fasilitas Pendukung

Pedagang juga menghadapi hambatan berupa kurangnya fasilitas pendukung di lokasi usaha, seperti area parkir, penerangan, dan tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut memengaruhi kenyamanan pengunjung dan berdampak pada aktivitas penjualan pedagang.

Selain itu, minimnya fasilitas pendukung menyebabkan beberapa lokasi usaha menjadi kurang menarik bagi pengunjung wisata.

e. Persaingan Antar Pedagang

Meningkatnya jumlah PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Pedagang harus bersaing dalam menarik minat pembeli, terutama pada jenis usaha makanan dan minuman yang relatif sama.

Persaingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang dalam mempertahankan pendapatan dan keberlangsungan usahanya.

Secara keseluruhan, implementasi strategi penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari sisi pemerintah maupun pedagang. Dari sisi pemerintah, hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan lahan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan. Sementara itu, dari sisi pedagang, tantangan utama berkaitan dengan ketidakpastian lokasi usaha, keterbatasan modal, dan penurunan pendapatan akibat kebijakan penataan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penataan PKL memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pedagang, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memperkuat pengawasan agar tujuan penataan kawasan wisata dapat tercapai tanpa mengurangi keberlangsungan ekonomi masyarakat.

F. Peran Stakeholder dan Partisipasi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Kelapa Lima

Setelah melakukan penelitian dengan Dinas Perdagangan Kota Yaitu Bapak Gun pada tanggal 11 April 2026 Beliau mengatakan bahwa "Keberhasilan dalam penataan bukan hanya tergantung pada Dinas Perdagangan Kota saja, namun ada juga pihak terkait yang memiliki peran dalam penataan pedagang kaki lima yaitu : Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri"

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang, keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan kawasan wisata. Stakeholder tersebut meliputi Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kelurahan, masyarakat, serta para pedagang kaki lima itu sendiri. Partisipasi stakeholder dalam proses penataan memiliki peran penting dalam menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, nyaman, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan stakeholder dalam penataan PKL di Pantai Kelapa Lima masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

1. Peran Dinas Perdagangan Kota Kupang

Dinas Perdagangan Kota Kupang memiliki peran utama dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Peran tersebut dilakukan melalui pendataan pedagang, sosialisasi peraturan, pengaturan lokasi usaha, serta pembinaan terhadap pedagang terkait kebersihan dan penataan tempat usaha.

Selain itu, Dinas Perdagangan juga berperan dalam mengoordinasikan relokasi PKL ke lokasi yang dianggap lebih strategis dan tertata, seperti Alun-Alun Kota dan Taman KJP. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan menggunakan pendekatan persuasif melalui dialog dan komunikasi dengan pedagang agar kebijakan penataan dapat diterima oleh masyarakat. Namun demikian, keterbatasan lahan, fasilitas, dan pengawasan menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dalam menjalankan program penataan secara maksimal.

2. Peran Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata memiliki peran dalam menjaga citra dan daya tarik kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Dalam konteks penataan PKL, Dinas Pariwisata berupaya menciptakan kawasan wisata yang bersih, tertib, dan nyaman bagi pengunjung.

Dinas Pariwisata juga mendukung pengembangan wisata kuliner sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah. Oleh karena itu, pedagang diarahkan untuk menjual produk yang lebih sesuai dengan konsep kawasan wisata, seperti makanan dan minuman siap saji yang lebih tertata dan higienis. Keterlibatan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata daerah.

3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan penataan. Penertiban dilakukan secara berkala bersama instansi terkait untuk menjaga ketertiban umum dan fungsi kawasan wisata. Peran Satpol PP penting dalam menegakkan peraturan daerah terkait penggunaan ruang publik, terutama terhadap pedagang yang masih berjualan di trotoar, badan jalan, atau lokasi yang dilarang. Meskipun demikian, penertiban yang dilakukan masih bersifat periodik sehingga belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

4. Peran Pemerintah Kelurahan dan RT/RW

Pemerintah kelurahan serta RT/RW memiliki peran dalam proses pendataan dan pengawasan terhadap PKL swadaya yang memanfaatkan lahan milik swasta. Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah pedagang serta mengontrol aktivitas usaha yang dilakukan di kawasan wisata. Selain itu, pemerintah kelurahan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan penataan PKL. Keterlibatan pemerintah kelurahan dan RT/RW sangat penting karena mereka lebih dekat dengan kondisi sosial masyarakat dan aktivitas pedagang di lapangan.

5. Peran Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi kawasan wisata memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penataan. Pedagang diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan penataan, serta mendukung terciptanya kawasan wisata yang tertib dan nyaman. Selain itu, partisipasi pedagang juga terlihat melalui kesediaan sebagian PKL untuk mengikuti relokasi dan menyesuaikan jenis usaha dengan konsep wisata kuliner yang diarahkan pemerintah.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat sebagian pedagang yang kurang mendukung kebijakan penataan karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan.

6. Peran Masyarakat dan Pengunjung

Masyarakat dan pengunjung kawasan wisata juga memiliki peran dalam mendukung

penataan PKL di Pantai Kelapa Lima. Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan kawasan wisata yang tertib. Sementara itu, pengunjung secara tidak langsung memengaruhi keberlangsungan usaha PKL melalui aktivitas konsumsi dan penilaian terhadap kenyamanan kawasan wisata. Semakin baik kondisi kawasan wisata, maka semakin besar minat masyarakat untuk berkunjung.

Secara keseluruhan, penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Perdagangan berperan dalam pembinaan dan pengaturan PKL, Dinas Pariwisata menjaga kualitas kawasan wisata, Satpol PP melakukan penegakan aturan, sedangkan pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pedagang turut mendukung pelaksanaan penataan di lapangan. Namun, partisipasi stakeholder dalam penataan PKL masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran aturan, penolakan relokasi, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya koordinasi dan partisipasi aktif pedagang dalam mendukung program pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, komunikasi yang intensif, serta penyediaan fasilitas yang memadai agar penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

G. Evaluasi Keberhasilan dan Rekomendasi Strategi PKL dan Rekomendasi dari PKL dan Pengunjung Reguler

Setelah Melakukan wawancara dengan Bapak Gun dan Ibu Leni Wara pada tanggal 12 April tahun 2026, beliau menyampaikan ada beberapa Evaluasi keberhasilan yang diterapkan:

1. Evaluasi keberhasilan:

"indikator yang dipakai itu sulit untuk dipakai apa tidak ada satu indikator tertentu yang dipakai untuk mengukur seorang PKL itu dia berhasil atau tidak. Tetapi ketika awalnya 2 orang kemudian menjadi 3 orang lalu bertambah menjadi 4 orang bertambah lagi menjadi 5 kemudian menjadi 10 Berarti di situ PKL berjalan artinya ada pemasukan dan terjadi transaksi"

2. Rekomendasi strategi:

"Kami berpikir untuk bagaimana supaya para PKL itu terelokasi berada pada lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan strategi lain untuk meningkatkan mereka punya omset misalkan ada pemerintah juga hadir misalkan Dia memberikan bantuan kepada PKL yang jual minuman dan makanan"

3. Evaluasi dari Ma Leni Wara:

"Dinas Perdagangan terus ingat pariwisata supaya jadi menata atau datang untuk berkunjung di sini supaya lihat situasi disini perdagangan kekurangan atau kelebihan"

Berdasarkan hasil penelitian Dengan Dinas Perdagangan Kota dan Pedagang kaki lima dapat di analisis bahwa ada beberapa Evaluasi keberhasilan dalam penataan pkl dan rekomendasi dari Pedagang Kaki lima yaitu:

1. Evaluasi Keberhasilan Strategi Penataan PKL

a. Perbaikan Kondisi dan Tata Ruang Kawasan Wisata

Pelaksanaan strategi penataan memberikan perubahan terhadap kondisi kawasan wisata Pantai Kelapa Lima yang menjadi lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Penempatan pedagang pada area tertentu membantu mengurangi penggunaan ruang publik secara tidak teratur, terutama pada trotoar dan badan jalan. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata. Selain itu, kondisi kawasan yang lebih rapi turut mendukung fungsi Pantai Kelapa Lima sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Kupang.

b. Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kawasan

Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah memberikan pengaruh terhadap kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pedagang mulai lebih memperhatikan pengelolaan sampah dan kebersihan area tempat usaha agar tetap nyaman bagi pengunjung. Kebijakan pengaturan jenis dagangan, khususnya pembatasan penjualan ikan mentah di kawasan tertentu, juga membantu mengurangi bau tidak sedap dan penumpukan sampah yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, kondisi lingkungan kawasan wisata menjadi lebih bersih dan mendukung citra kawasan wisata.

c. Berkembangnya Aktivitas Ekonomi Pedagang

Penataan kawasan wisata turut memberikan peluang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi pedagang. Kawasan yang lebih tertib dan nyaman mampu menarik minat pengunjung untuk datang dan melakukan aktivitas konsumsi di lokasi wisata. Selain itu, keberadaan PKL yang menjual makanan dan minuman siap saji menjadi bagian dari pengembangan wisata kuliner di kawasan Pantai Kelapa Lima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penataan tidak hanya berfokus pada ketertiban kawasan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

d. Pelaksanaan Penataan Belum Berjalan Secara Maksimal

Meskipun telah menunjukkan perkembangan, pelaksanaan strategi penataan PKL masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang belum dilakukan secara intensif menyebabkan beberapa pedagang kembali menempati area yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

e. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung

Keberhasilan penataan kawasan wisata juga masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pendukung. Fasilitas seperti penerangan jalan, area parkir, tempat sampah, dan sarana usaha masih belum memadai untuk menunjang aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang merasa kurang nyaman menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah, sementara pengunjung juga belum sepenuhnya merasakan kenyamanan saat berada di kawasan wisata.

2. Rekomendasi dari Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan hasil wawancara, pedagang memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah guna meningkatkan efektivitas strategi penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima, antara lain sebagai berikut:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Pedagang berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendukung yang lebih lengkap, seperti lampu penerangan, area parkir, tempat sampah, serta sarana usaha yang layak agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan baik.

b. Penetapan Lokasi Usaha yang Jelas dan Strategis

PKL mengharapkan adanya lokasi khusus yang tetap dan strategis sehingga pedagang memiliki kepastian tempat usaha tanpa harus khawatir terhadap relokasi yang dilakukan sewaktu-waktu.

c. Dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Usaha

Pedagang berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan dukungan melalui pembinaan usaha, bantuan sarana, dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha agar PKL dapat berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri dan tertata.

d. Peningkatan Komunikasi antara Pemerintah dan Pedagang

Pedagang mengharapkan adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan PKL

dalam setiap proses penataan. Pendekatan melalui dialog dinilai lebih efektif dalam menciptakan kerja sama dibandingkan tindakan penertiban yang bersifat sepihak.

3. Rekomendasi dari Pengunjung Reguler

Pengunjung reguler kawasan wisata Pantai Kelapa Lima juga memberikan beberapa saran terkait pengelolaan dan penataan kawasan wisata, yaitu sebagai berikut:

a. Menjaga Kebersihan dan Keindahan Kawasan

Pengunjung berharap pemerintah dan pedagang dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan kawasan wisata agar pengunjung merasa lebih nyaman saat berkunjung.

b. Penataan Pedagang yang Lebih Teratur

Pengunjung menginginkan penempatan pedagang dilakukan secara lebih teratur agar tidak mengganggu akses jalan maupun ruang publik lainnya. Penataan yang baik dinilai mampu menciptakan suasana wisata yang lebih nyaman dan menarik.

c. Penambahan Fasilitas Umum

Pengunjung berharap adanya penambahan fasilitas umum seperti tempat duduk, area parkir, penerangan, dan tempat sampah guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan kawasan wisata, terutama pada malam hari.

d. Pengembangan Konsep Wisata Kuliner

Pengunjung menilai bahwa keberadaan PKL dapat menjadi daya tarik wisata apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kawasan Pantai Kelapa Lima diharapkan dapat dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner yang tertata dan memiliki ciri khas daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan PKL telah dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan pengaturan lokasi usaha, pembinaan pedagang, pengawasan, serta pendekatan persuasif kepada para pedagang. Strategi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang dengan dukungan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, serta pemerintah kelurahan. Penataan dilakukan melalui penyediaan area khusus usaha, pengaturan zonasi, sosialisasi aturan, pembinaan kebersihan dan pelayanan, serta penertiban terhadap pedagang yang melanggar ketentuan.

Pelaksanaan strategi penataan memberikan dampak positif terhadap kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Kawasan menjadi lebih tertata, kebersihan lingkungan mulai meningkat, serta kenyamanan pengunjung menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, keberadaan PKL juga tetap memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat lokal melalui usaha kuliner dan perdagangan di kawasan wisata. Penataan yang dilakukan turut mendukung pengembangan Pantai Kelapa Lima sebagai destinasi wisata yang memiliki potensi wisata kuliner.

Namun demikian, implementasi strategi penataan PKL masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di trotoar, badan jalan, dan area yang tidak sesuai dengan ketentuan. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti penerangan, tempat sampah, area parkir, dan sarana usaha juga menjadi hambatan dalam menciptakan kawasan wisata yang nyaman dan tertata. Selain itu, keterbatasan lahan relokasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang terhadap aturan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan program penataan secara efektif.

Dari sisi pedagang, kebijakan penataan menimbulkan tantangan berupa ketidakpastian lokasi usaha, keterbatasan modal usaha, serta kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan akibat relokasi. Sebagian pedagang merasa lokasi yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Kondisi tersebut menyebabkan masih

adanya penolakan terhadap kebijakan relokasi dan penataan yang diterapkan pemerintah daerah.

Keberhasilan penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pedagang itu sendiri. Namun, koordinasi dan partisipasi antar pihak masih perlu ditingkatkan agar tujuan penataan kawasan wisata dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penataan PKL di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima tidak hanya membutuhkan penegakan aturan, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan, pemberdayaan, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bromley, Ray. "Street Vending and Public Policy: A Global Review." *International Journal of Sociology and Social Policy*.
- Donovan, Michael G. "Informal Cities and the Contestation of Public Space." *Urban Studies*.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tim Penataan PKL Pantai Kelapa Lima.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang 2019–2039.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
- Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Pemberdayaan PKL Kawasan Wisata.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roever, Sally & Skinner, Caroline. "Street Vendors and Cities." *Environment and Urbanization*.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryani, Tatik. "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima terhadap Pendapatan Pedagang." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjajanti, Retno. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Perkotaan." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.